

DISPENSASI UMUR PERKAWINAN
(Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

TEGUH SURYA PUTRA

NIM : 0810113353



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013

A. JUDUL

Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)

B. ABSTRAKSI

ABSTRAKSI

Teguh Surya Putra, 2013, Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang), Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.; M. Hisyam Syafioedin, S.H.

Penulisan ini membahas mengenai pelaksanaan Dispensasi Umur Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang. Dengan banyaknya angka perkawinan yang terjadi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Namun selain diatur mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan perkawinan juga diatur mengenai peluang adanya penyimpangan terhadap batas umur terendah dalam perkawinan melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, timbullah masalah mengenai mengapa Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan dispensasi umur perkawinan kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan dan faktor apa saja yang menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan.

Dalam penelitian penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk mengetahui penerapan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada masyarakat di Kota Malang. Mengenai data penelitian penulis memperoleh data dari wawancara dan studi kepustakaan.

Pemberian dispensasi umur perkawinan dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang telah sadar akan adanya hukum yang berlaku di Indonesia. Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi. Sedangkan Faktor-faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang yaitu karena calon mempelai perempuan telah hamil sebelum melakukan perkawinan. Faktor kedua karena Kondisi ekonomi yang lemah. Faktor ketiga yaitu karena lemahnya tingkat pendidikan dari masyarakat. Faktor keempat yaitu karena faktor budaya atau tradisi dalam masyarakat.

ABSTRACT

TEGUH SURYA PUTRA, 2013, Dispensational Age Marriage (Study of Implementation of Article 7, Section 2 of Act No. 1 of 1974 of the Religious Court Malang), Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.; M. Hisyam Syafioedin, S.H.

Writing is to discuss the implementation of the dispensation Age Marriage Religious Court of Malang. With the large number of marriages that occurred in Indonesia, the Government issued Law No. 1 of 1974 About Marriage. One of the requirements under the Marriage Act regulates the lowest age restriction in the hold marriage. But in addition to set the lowest age limit for marriage is also arranged establish the chances of distortion of the lowest age limit of marriage through the dispensation granted by the court.

Based on the above explanation, the problem arises as to why Article 7, Section 2 of Act No. 1 of 1974 provides exemption age of marriage to couples underage marriage that would hold and what factors are causing couples underage marriage that would apply for exemption perpetuate life marriage.

In this study the authors use sociological juridical approach to determine the application of Article 7, Section 2 of Act No. 1 of 1974 to the public in the city of Malang. Regarding the research data the authors obtained data from interviews and literature study.

Granting dispensation age of marriage performed in an attempt to satisfy the justice in a society that has been aware of the laws in force in Indonesia. Granting dispensation age of marriage is also expected to benefit the community, so as to provide convenience and a way out for problems that occur. While the factors that cause couples to apply for exemption under the age of marriage in the Religious Malang is because the prospective bride was pregnant before marriage. The second factor is due to weak economic conditions. The third factor is the weakness of the level of education of the community. The fourth factor is because of culture and tradition in the community.

C. KATA KUNCI

Dispensational Age Marriage, Religious Court, Sociological Juridical, The Book Of The Law Civil Law, Law No. 1 of 1974

D. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.²

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”³ Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain diatur mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan perkawinan juga diatur mengenai Dispensasi

¹*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, Wipress, hal 457.

²*Ibid.*, hal 458.

³*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, Wipress, hal 459.

Umur Perkawinan. Dispensasi umur perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”⁴ Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak semata-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi umur perkawinan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan, Karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.

E. MASALAH

1. Mengapa Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan dispensasi umur perkawinan kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Faktor apa saja yang menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan.

F. METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian secara langsung terhadap hukum yang berlaku dimana dalam hal ini hukum yang diteliti adalah Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam

⁴Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, hal 459.

penelitian empiris yaitu disesuaikan dengan kenyataan yang ada, yaitu pada masyarakat yang mengajukan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana yuridis untuk menganalisis mengenai dispensasi umur perkawinan yang dilakukan masyarakat di Pengadilan Agama Kota Malang, terutama mengenai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pendekatan sosiologis ialah upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma hukum akan tetapi juga perilaku dari masyarakat.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, Sumber data secara langsung diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tempat penelitian ini dilaksanakan. Dan orang-orang yang telah mengajukan dispensasi umur perkawinan.
2. Data Sekunder, yaitu sumber data kedua setelah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan. Sumber data sekunder memberikan informasi dari data yang telah disalin, diterjemahkan, atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu, yaitu dengan cara menghimpun data-data dari perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, Penelusuran Internet, dan lain-lain. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui sistem telaah dengan cara membaca, mempelajari, identifikasi, kemudian mengklasifikasikannya sehingga diperoleh informasi yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas.

Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pemberian dispensasi umur perkawinan oleh pengadilan Agama Kota Malang. Kemudian dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder untuk menjawab rumusan-rumusan masalah.

G. PEMBAHASAN

1. Dispensasi Umur Perkawinan Bagi Pasangan Di Bawah Umur Yang Akan Melangsungkan Perkawinan

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara dibidang ekonomi Syari'ah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Sedekah
- i. Dan Ekonomi Syari'ah

Pasal 49 ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat 2 ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu :

1. Izin beristri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.
8. Perceraian karena *thalaq*.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjuk seorang dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul anak.
21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan melakukan perkawinan campuran, dan
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.⁵

Bidang-bidang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama secara umum, sehingga semua Pengadilan Agama hanya boleh mengadili bidang-bidang di atas, selain yang ada bidang-bidang tersebut Pengadilan Agama tidak berwenang.

⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, h. 105-108.

Kekuasaan Pengadilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Relatif" dan "Kekuasaan Absolut". Kekuasaan *relatif* adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Sedangkan kekuasaan *absolut* adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁶

Pemberian dispensasi umur perkawinan oleh pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan didasarkan pada tujuan dan alasan-alasan tertentu, antara lain:

a. Rasa Keadilan

Dalam kasus dispensasi umur perkawinan, faktor dominan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan adalah karena terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Hal tersebut merupakan hal yang sangat memalukan di kalangan masyarakat.

Hakim menilai, orang tua yang melakukan permohonan dispensasi umur perkawinan untuk anaknya, merupakan orang yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum daripada menikahkan anaknya secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan.⁷

Kesadaran hukum dari orang tua ini patut dihargai dan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan. Dalam hal ini, hakim harus berlaku adil terhadap mereka yang rela datang ke Pengadilan Agama meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk melakukan permohonan dispensasi umur perkawinan.

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, h. 25-27.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH. , (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 11 Desember 2012

b. Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat

Dalam kasus dispensasi umur perkawinan, pemberian dispensasi umur perkawinan dalam kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁸

Sebagaimana penjelasan tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi umur perkawinan, maka dapat kita lihat bahwa alasan orang tua sebagai pihak pemohon adalah karena kondisi yang sudah sangat mendesak. Orang tua sudah tidak bisa mengatasi tingkah laku anak- anaknya.

Di sinilah peran hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar atas persoalan- persoalan yang dihadapi masyarakat. Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tersebut tidak diberikan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar.

Orang tua yang anak gadisnya telah hamil sebelum menikah atau orang tua yang anak laki- lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih di bawah umur yang ditetapkan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan, akan mendapatkan tekanan dari masyarakat berupa gunjingan dan pengucilan karena dianggap tidak mampu mendidik anak- anaknya dengan baik. Anak- anak yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan menyebabkan terjadinya kehamilan juga akan mengalami hal yang sama di dalam masyarakat. Meskipun aib yang sudah terlanjur dilakukan tidak dapat dihapus di mata masyarakat, namun yang lebih penting adalah upaya hukum yang dilakukan oleh orang tua ini akan membuat hubungan anak- anaknya lebih jelas dan sah di mata hukum.

Dalam kasus semacam ini, Permohonan dispensasi umur perkawinan diberikan. Dilihat dari segi manfaatnya, maka akan lebih baik jika kedua calon mempelai ini dinikahkan agar status mereka jelas dan status anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan juga jelas di mata hukum. Apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan,

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH. , (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 11 Desember 2012

maka mungkin saja timbul hal- hal yang tidak diinginkan, misalnya si calon mempelai perempuan nekat menggugurkan kandungannya, mengingat usia kehamilan yang masih muda karena malu kepada masyarakat sekitarnya. Jika hal ini terjadi, maka si calon mempelai perempuan ini melakukan dosa besar lagi selain melakukan hubungan seks sebelum menikah.

Untuk menghindari hal- hal yang demikian, maka harus benar-benar mempertimbangkan manfaat dari adanya Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada masyarakat yang melakukan upaya permohonan dispensasi umur perkawinan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Diajukan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi maraknya fenomena dispensasi umur perkawinan. Pengajuan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu :

1. Hamil di Luar Nikah

Menurut Bapak Munasik, banyaknya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama.⁹ Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama.

Orang tua seringkali bertindak terlambat. Mereka mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi. Banyak anggapan

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH. , (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 11 Desember 2012

bahwa pacaran di kalangan remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap biasa. Padahal, anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan.

Kondisi seperti di atas, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan. Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya perkawinan, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius.

Oleh karena itulah, mayoritas alasan permohonan dispensasi umur perkawinan adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu.¹⁰ Jika kondisinya sudah demikian, maka satu- satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari.

Faktor ini yang seringkali menyebabkannya diajukannya dispensasi umur perkawinan oleh pemohon dispensasi umur perkawinan, dan Permohonan tersebut secara terpaksa di kabulkan. Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.¹¹

2. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH. , (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 11 Desember 2012

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH. , (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 11 Desember 2012

tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.¹²

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang. Sayangnya, terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.

Kita juga masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.¹³

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.

3. Faktor Pendidikan

Menurut Bapak Munasik bahwa pemohon mempunyai alasan anaknya sudah tidak sekolah, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH. , (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 11 Desember 2012.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH. , (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 2 Januari 2013.

memfasilitasi anak- anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga.¹⁴

Pemikiran semacam ini memang masih cukup melekat pada masyarakat pedesaan. Mereka tidak terbiasa melihat perempuan bekerja di luar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur. Hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan memintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama.

Pendidikan kepada anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan perkawinan di bawah umur.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Hal inilah yang mendorong orang tua untuk lebih cepat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4. Faktor Adat dan Tradisi Masyarakat

Bila di kota-kota besar, kecenderungan perempuan menikah di usia dewasa dan tak jarang menjadi semacam permainan hidup, di sudut lain masih ada anak yang dinikahkan orang tuanya ketika masih di bawah

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH. , (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 11 Desember 2012

umur. Di beberapa daerah tertentu di Kota Malang masih dipengaruhi oleh faktor budaya atau tradisi dalam masyarakat. Masih terdapat beberapa pemahaman tentang dilakukannya perkawinan di bawah umur. Kebiasaan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur sering dilakukan oleh masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat dan tradisi yang ada. Hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.

Bapak Munasik menjelaskan bahwa hampir 40 persen penduduk Kota Malang berasal dari masyarakat Madura atau masih dipengaruhi oleh kultur Madura. Masyarakat Madura lebih cenderung untuk menikahkan anaknya yang di bawah umur, mereka akan merasa malu apabila anak perempuan mereka tidak kunjung dilamar. Orang Tua mendesak anaknya untuk segera menikah, Mereka terbiasa menikahkan anaknya di usia muda, bahkan usia anak-anak asalkan dianggap sudah pantas untuk menikah. Oleh karena itu mereka lebih cenderung menikahkan anaknya setelah lulus dari bangku sekolah dasar. Masyarakat Madura juga kerap menjodohkan anak mereka dari saat masih sangat kecil untuk menghindari perasaan malu tersebut. Dalam hal perjodohan yang dilakukan, mereka memilih sesuai dengan level atau strata sosial yang dimiliki oleh masing-masing calon mempelai yang ingin melakukan perkawinan. Level atau strata sosial dilihat dari garis keturunan masing-masing calon, harta kekayaan, dan status sosial yang dimiliki oleh pihak keluarga yang ingin menjodohkan anak mereka.¹⁵

Bapak Munasik juga menambahkan bahwa rata-rata umur calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut antara 15 tahun atau saat mereka telah menyelesaikan bangku sekolah dasar. Mereka beranggapan bahwa menikah muda atau di bawah batas minimal umur perkawinan lebih baik daripada menjadi perawan tua. Jadi, jika seorang perempuan tetap melajang pada umur di atas sekitar 15 tahun, biasanya ia

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH. , (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 2 Januari 2013.

dianggap terlambat menikah. Hal tersebutlah yang mendorong orang tua untuk mendorong anaknya untuk melakukan perkawinan di bawah umur.¹⁶

Dalam perspektif adat, kerap kali perkawinan di bawah umur terjadi karena dorongan kultural dalam satu komunitas yang memposisikan perempuan sebagai kelas dua. Masyarakat menghindari stigma sebutan perawan tua sehingga mereka berupaya mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan.

H. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pemberian dispensasi umur perkawinan oleh Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang telah sadar akan adanya hukum yang berlaku di Indonesia. Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang yaitu karena calon mempelai perempuan telah hamil sebelum melakukan perkawinan, karena kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, karena lemahnya tingkat pendidikan dari masyarakat. Hal tersebut menyebabkan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya. Faktor keempat yaitu karena faktor budaya atau tradisi dalam masyarakat.

2. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama

Lebih selektif dalam memberikan dispensasi umur perkawinan kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan di Pengadilan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH. , (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 11 Desember 2012

Agama Kota Malang, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat agar lebih sadar dan mengerti akan adanya hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta mematuhi Undang-undang tersebut. Agar dapat terwujud suatu perkawinan yang bahagia dan sejahtera. Selain itu diharapkan agar orang tua lebih mendidik dan menjaga anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar maupun rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang, sehingga akan ditemukan suatu produk penelitian yang nantinya dapat dijadikan dasar bagi pengembangan hukum perkawinan nasional.

I. DAFTAR PUSTAKA

Roihan A. Rasyid, 2006, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sulaikin Lubis, 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress.